

Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat

Jimmy Herman

Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

Abstract: *This research aims to describe and analyse the implementation of infrastructure development in order to accelerate development in district of Sekolaq Darat Sub Province of Kutai Barat. The result found that the implementation of infrastructure in order to acceleration of development area in district of Sekolaq Darat was effective. Result of the development have successfully adding 80 percent facilities and basic facilities in area. This performance was not reached final goals 100 percent because of limitation of budget allocation. This factor was main resistor factor of development in infrastructure in Sekolaq Darat.*

Keywords : *Infrastructure Development, Implementation, Acceleration*

Abstrak

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa implementasi pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan daerah di kecamatan Sekolaq Darat sudah efektif. Hasil pembangunan tersebut mampu menambah 80 persen sarana dan prasarana di daerah tersebut. Keberhasilan ini belum mencapai target 100 persen dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran. Faktor ini menjadi penghambat utama pembangunan infrastruktur di Sekolaq Darat. Selain itu keterlambatan pencairan dana menjadi penyebab tambahan mengapa pembangunan infrastruktur tersebut terhambat.*

Kata Kunci: *Pembangunan Infrastruktur, Implementasi, Percepatan*

Pendahuluan

Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama bagi seluruh elemen bangsa Indonesia perlu adanya percepatan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi agar tercipta pemerataan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan potensi daerah secara optimal. Sebagaimana diamanatkan dalam program pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang bahwa pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pembangunan merupakan pencerminan kehendak rakyat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Diperlukan pemahaman masyarakat tentang pembangunan melalui strategi pencapaiannya agar tercapai secara optimal. Dalam hal pembangunan sebenarnya bukan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, namun perlu adanya partisipasi masyarakat. Otonomi yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain penyelenggaraan pemerintah sebagai urusan rumah tangga yang berdiri sendiri, yang meliputi tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasilnya. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonom.

Namun terdapat pula fakta lain, yaitu hasil evaluasi daerah otonomi hasil pemekaran yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang menyebutkan tentang kegagalan pemekaran daerah otonom di Indonesia yang hampir mencapai 80 persen. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya masalah tentang implementasi pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan daerah, yaitu keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Kecamatan Sekolaq Darat, lokasi penelitian ini, memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.394 jiwa yang terdiri dari pria sebanyak 4.428 jiwa dan wanita sebanyak 3.966 jiwa dengan kepadatan penduduk 50,73 jiwa per km². Secara geografis, Kecamatan ini terletak antara 115° 43" 21' Bujur Timur dan 115 ° 47" 27' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 165,46 km² atau 10,14 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Barat. Secara politis, Pemerintah Kecamatan Sekolaq Darat telah mencanangkan percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berbasis 7 komunitas kampung di wilayah administratif Kecamatan Sekolaq Darat. Pembangunan harus bergerak dari bawah, dari masyarakat kampung menuju pusat kabupaten. Strategi dan kebijakan pembangunan ini secara eksplisit telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sekolaq Darat 2011 – 2016. Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, terutama mengenai implementasi pembangunan bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan di Kecamatan Sekolaq Darat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap fenomena yang terjadi dan sekaligus dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, terutama mengenai implementasi pembangunan bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan di Kecamatan Sekolaq Darat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2016, mengingat secara empirik pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam percepatan pembangunan belum mencapai hasil yang optimal dibidang pembangunan prasarana jalan dan jembatan serta fasilitas umum publik di Kecamatan Sekolaq Darat berupa prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi dan peribadatan yang merupakan fasilitas dasar publik.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai “*Whatever governments chooses to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut.

Implementasi Kebijakan

Sebagai proses lebih lanjut setelah suatu program dirumuskan dalam bentuk keputusan (*decision*) oleh para aktor adalah bagaimana program itu diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini berarti antara perumusan kebijakan dengan implementasinya saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Berpijak dari pengertian tersebut maka aspek teknis atau manajemen (dalam suatu organisasi) merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan publik. Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program pelaksanaannya telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Pembangunan

Pembangunan menurut Kartasasmita (1996:3) pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*).

Pembangunan Infrastruktur

Dalam rangka mempercepat pembangunan di suatu daerah harus didukung dengan berbagai faktor, diantaranya pembangunan infrastruktur. Todaro, (2000 : 218) menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat, bahkan hasilnya pun kurang optimal. Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan terhadap infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari aksesibilitas yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian deskriptif - kualitatif bermaksud mendeskripsikan realitas sebuah peristiwa untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian ini meliputi Implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Pembangunan infrastruktur dalam percepatan pembangunan daerah di Kecamatan Sekeloaq Darat.

Kondisi Demografis

Kecamatan Sekolaq Darat memiliki luasan wilayah sebesar 165,46 km² atau 10,14 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dari jumlah tersebut kemudian dibagi kedalam 7 (tujuh) wilayah kampung antara lain Kampung Sumber Rejo, Kampung Sekolaq Darat, Kampung Sri Mulyo, Kampung Sekolaq Joleq, Kampung Sumber Bangun, Kampung Sekolaq Oday dan Kampung Sekolaq Muliaq. Menurut pembagian wilayah pada masing – masing kampung luasnya berbeda dan dari tujuh Kampung tersebut yang paling luas wilayahnya berada pada Kampung Sekolaq Muliaq, dengan luas wilayah 51,01 km², sedangkan kampung yang paling kecil wilayahnya berada pada Kampung Sumber Bangun dengan luas wilayah sebesar 7,46 km². Kecamatan Sekolaq Darat lebih dikenal dengan Kawasan Cagar Alam Padang Luway atau Kersik Luway yang merupakan kawasan hutan kerangas, yang tanahnya berupa kersik (pasir) yang berwarna putih seluas 45 hektar dengan tumbuhan yang terkenal yaitu anggrek hitam (*Coelogyne Pandurata*) dan Kantong Semar (*Nepenthes*).

Kondisi Infrastruktur

Pada tahun 2013 kondisi jalan baik di Kecamatan Sekolaq Darat mencapai 36,82 Km yang telah diaspal. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 26,25 Km. Berdasarkan data kondisi jalan di wilayah kecamatan sekolaq darat menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus menambah dan meningkatkan infrastruktur jalan yang bertujuan dalam percepatan pembangunan daerah.

Infrastruktur kesehatan di Kecamatan Sekolaq Darat sebagai fasilitas kesehatan dasar tersebut telah tersedia. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa warga Kecamatan Sekolaq Darat dapat langsung berobat di Puskesmas Sekolaq Darat dan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat yang letaknya berada pada wilayah administratif Kecamatan Sekolaq Darat tepatnya di kampung Sekolaq Joleq.

Mengacu kepada RPJMD Tahun 2006-2011, kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat juga diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara intensif terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan melalui kucuran dana yang proporsional untuk pembangunan fisik sekolah, melakukan rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah yang kondisinya kurang layak untuk proses kegiatan belajar mengajar, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pengadaan sarana penunjang proses pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, alat peraga dan lain-lain.

Sarana perekonomian di kecamatan sekolaq darat didominasi oleh fasilitas perdagangan berupa pasar tradisional yang lebih dikenal dengan pasar malam. Dilihat dari perkembangannya bahwa geliat dari perdangan di kecamatan ini menunjukkan hasil yang positif. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi pembangunan daerah perlu dilakukan identifikasi potensi untuk memperoleh data yang realibel tentang potensi perdagangan yang baik untuk dikembangkan di

wilayah ini sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi.

Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah

Pembangunan Sarana Jalan

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan masyarakat perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satunya pembangunan bidang sarana dan prasarana jalan. Karena dengan sarana jalan yang memadai, niscaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Disisi lain dapat memudahkan aksesibilitas penduduk dalam segala bentuk kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Jalan merupakan prasarana yang sangat vital untuk menunjang kelancaran sarana transportasi sekaligus sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta sebagai jalur arteri bagi transportasi lokal, karena itu sudah selayaknya pembangunan sarana jalan dan jembatan mendapat perhatian yang lebih besar, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses dapat diwujudkan. Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan antar kampung, maupun antar wilayah kecamatan.

Berpijak dari kesimpulan diatas tersebut maka dari aspek implikasi secara teoritis menurut Abdul Wahab (1997) dan juga Mazmanian Sabatier (1981) telah terwujud sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan publik yaitu proses implementasi kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program pelaksanaannya telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Pembangunan Prasarana Kesehatan

Pembangunan prasarana kesehatan mempunyai posisi penting untuk mendukung terselenggaranya pemerintah yang efektif, sebab dengan prasarana kesehatan yang memadai niscaya kesehatan para penyelenggaran negara/pemerintah dan masyarakat akan lebih terjamin. Maka dari itu sudah selayaknya jika mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah, agar tingkat derajat kesehatan masyarakat dan penyelenggara negara/pemerintah dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif. Bagaimanapun pembangunan prasarana kesehatan sangat urgen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena itu sudah selayaknya jika prasarana kesehatan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat agar dapat diakses dengan mudah, murah dan bermutu.

Keberadaan pembangunan infrastruktur dibidang kesehatan menunjukkan bahwa telah tersedia prasarana, tetapi masih kurang dibarengi dengan sarana dan tenaga medis yang kompeten di bidangnya masing-masing. Pihak pemerintah kecamatan telah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi terkait dengan keterbatasan sumber daya aparatur tiap tahunnya dalam mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi untuk melengkapi tenaga teknis. Dengan

adanya koordinasi yang baik ini membawa kontribusi untuk menunjang kelancaran pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kecamatan Sekeloaq Darat.

Secara teoritis menurut Anderson (1997) bahwa implementasi kebijakan dilihat dari siapa yang mengimplementasikan kebijakan dan dampak. Dapat dijelaskan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat implementasi selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana yang oleh Anderson disebut “*administrative unit*” yaitu jajaran birokrasi publik dari level atas sampai level yang paling rendah dan secara otomatis mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan

Pembangunan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang harus terus ditingkatkan karena mengingat keberhasilan pembangunan yang sedang akan dan terus dilakukan tidak lepas dari pengaruh kualitas sumberdaya manusia, baik itu di dalam tubuh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pembangunan infrastruktur bidang pendidikan menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016. Perhatian yang serius oleh Pemerintah Kutai Barat bukan hanya pada pembangunan gedung, fasilitas kelengkapan belajar mengajar, tetapi juga kualitas tenaga pengajar/guru agar dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Keberadaan Pembangunan prasarana pendidikan bertujuan mengupayakan agar peserta didik di wilayah Kecamatan Sekeloaq Darat mendapatkan kesempatan seluas – luasnya untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran yang bermutu, sehingga pembangunan infrastruktur pendidikan diarahkan untuk membangun dan melengkapi fasilitas pendidikan yang ada. Didukung juga dengan upaya penambahan tenaga guru, baik yang berstatus PNS maupun Honorer karena tanpa dukungan tenaga pendidik, maka akan menghambat proses belajar mengajar, sehingga keberadaan pembanguan infrastruktur dibidang pendidikan mendapat perhatian yang besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan kualifikasi pengajar yang diharapkan dalam memajukan pendidikan di Kecamatan Sekeloaq Darat.

Secara sederhana menurut teori Lineberry bahwa proses implementasi meliputi semua tindakan antara pernyataan (formulasi) kebijakan dan dampak aktualnya. Proses implementasi tersebut memiliki elemen untuk menetapkan tanggung jawab implementasi, menjabarkan tujuan, mengkoordinasikan sumberdaya serta pengalokasian sumberdaya guna kesempurnaan dampak atau untuk mencapai tujuan.

Pembangunan Prasarana Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi dalam rangka pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat selalu terus ditingkatkan. Pembangunan ekonomi tidak hanya dengan menciptakan sistem regulasi yang mengatur mengenai sentra-sentra ekonomi dan perdagangan dilakukan, namun juga harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur ekonomi yang mampu mendukung proses perdagangan

itu sendiri, terutama dalam masyarakat sehingga roda jalanya perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Menyadari bahwa pembangunan sarana perekonomian sangat diperlukan oleh masyarakat dan para pelaku ekonomi di daerahnya, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menuangkan rumusan dalam rencana jangka pendek yang dibuat dalam rencana strategis Kabupaten Kutai Barat dalam menciptakan sentra-sentra ekonomi dan perdagangan serta pasar tradisional yang mampu meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat. Penekanan kepada sentra pergadangan atau pasar ini karena secara teroris dinyatakan keberadaan sentra perdagangan atau pasar akan mampu mengundang berkumpulnya para pelaku usaha perdagangan dan industri, serta bermacam-macam komoditas, sehingga pasar akan menjadi sentra ekonomi yang terus berkembang.

Dengan adanya keberadaan pembangunan infrastruktur ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi infrastruktur ekonomi berjalan baik dalam segi perencanaan yang bersifat *bottom up* serta menjadi wujud nyata sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Barat agar terwujudnya masyarakat Kutai Barat yang semakin cerdas, sehat, produktif dan berbasikan ekonomi kerakyatan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1985 : 447), bahwa Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok, yang dimaksudkan mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Hal ini termasuk upaya mantrasformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat

Faktor – faktor yang mendukung meliputi

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Atas kebijakan tersebut Kabupaten Kutai Barat dapat melakukan pembangunan infrastruktur diberbagai wilayah kecamatan, termasuk Kecamatan Sekolaq Darat dalam rangka pemerataan pembangunan daerah.
- b. Dukungan seluruh warga terhadap kebijakan pemerintah melalui usulan-usulan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten mengenai perlunya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolaq Darat, dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
- c. Kondusifnya suasana dan lingkungan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolaq darat dapat dilaksanakan.

Faktor – faktor yang Menghambat meliputi :

- a. Terbatasnya anggaran belanja daerah untuk bidang pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang

- ekonomi, sehingga percepatan pembangunan daerah belum dapat diaktualisasikan.
- b. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh para kontraktor sehingga hasil pembangunan infrastruktur kurang optimal.
 - c. Rendahnya aksesibilitas transportasi ke lokasi yang akan dibangun infrastrukturnya sehingga diperlukan biaya yang lebih besar.
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah, sehingga kondisinya cepat rusak.
 - e. Faktor pendanaan yang sering terlambat sehingga seringkali proyek pembangunan terhenti sehingga tidak mencapai target waktu dari pembangunan tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat secara implementatif cukup efektif dan mampu menambah beberapa sarana dan prasarana, bukan hanya prasarana jalan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, tetapi juga menambah prasarana ekonomi. Selanjutnya, meskipun pembangunan infrastruktur yang dilakukan di wilayah Kecamatan Sekolaq Darat belum optimal, tetapi tindakan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Sekolaq Darat telah membawa perubahan yang lebih baik, dan membuat suasana dan lingkungan masyarakat lebih aman dan nyaman. Kemudian faktor yang mendukung pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolaq Darat meliputi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Kemampuan Camat Sekolaq Darat dalam melakukan pendekatan dengan pimpinan organisasi vertikal pemerintah kabupaten dan koordinasi dengan beberapa pimpinan instansi terkait, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolaq Darat adalah terbatasnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan prasarana ekonomi, rendahnya aksesibilitas transportasi sehingga diperlukan biaya yang lebih besar, dan faktor pendanaan yang sering terlambat sehingga secara aplikatif pembangunan infrastruktur kurang lancar dan berujung pada kurang efektifnya hasil yang dicapai.

Saran-Saran

Dari hasil penelitian diatas maka penulis menyarankan beberapa hal berikut ini, yang pertama adalah meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur khususnya prasarana jalan, karena masih banyak jalan yang belum dilakukan pengerasan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang diajukan setahun sekali. Kedua mensinkronkan antara rencana kerja dengan pencairan dana sehingga pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga mencapai target yang diharapkan. Dan ketiga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah atau melakukan mitra kerja/kerja sama untuk akselerasi pembangunan

Daftar Pustaka

- _____, Undang-undang Nomor. 32 dan 33 tahun 2004, tentang *pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah*, Indonesia. Jakarta.
- _____, Badan Pusat Statistik, 2013. *Kabupaten Kutai Barat dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Kutai Barat.
- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making* Holt, Rinehart and Winston. New York.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Billa, Marthin. 2006. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Malinau Masa Bakti 2001-2006. Pemda Malinau. Malinau.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Canning, D. 1999. *Infrastrukture's Contribution to Agregate output*. World Bank Working Paper, Number 2246.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Texas A dan M University, Congressional Quarterly Press.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. _____. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Grindle, M. 1980. *Politics and Policy Implementations in the third World*. Princeton University Press
- Islamy, A. Irvan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Edisi 2 Cet. 1. Bina Aksara: Jakarta.
- Maleong, Lexy. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier (eds), 1981. *Effectivly Policy Implementation*. Lexington Mass.
- Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*, Baverly Hills, Sage Publication inc
- Milles B, Mathew dan A.Michaell Huberman. 2005. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang metode-metode Baru. Diterjemahkan oleh TR. Rohidi Jakarta: Penerbit Univesitas Indonesia. Jakarta.
- Sabatier. 1988. *Implementation: The Concepts of Optimal Conditions for Effectively Accomplishing Objectives, in Public Administration* (Ed Stillman H, R.J) George Mason University.
- Todaro, M. P. 1992. *Ekonomi Pembangunan di Dunia ke Tiga*. Terjemahan dari: Haris M. Erlangga, Jakarta.
- Van Meter, D.S. and C.E. Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process: Conceptual Framework*. USA. Administration and Society.
- Yanuar, R. 2006. *Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output serta Dampaknya terhadap Kesenjangan di Indonesia*. Tesis Pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.